



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang..../2

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 114);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh;
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh; dan
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Renja SKPA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Renja SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Tahun 2023 yang mulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

Renja SKPA Pemerintah Aceh Tahun 2023 digunakan untuk:

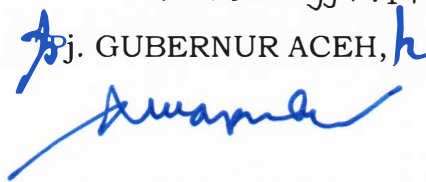
- a. Dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah; dan
- b. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA Tahun 2023.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

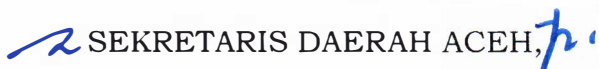
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Juli 2022
26 Dzulhijjah 1443

 GUBERNUR ACEH, *h*

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Juli 2022
26 Dzulhijjah 1443

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA
 PERANGKAT ACEH TAHUN 2023.-----

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
 TAHUN 2023

No.	NOMOR RENJA SKPA	SKPA	Keterangan
1	2	3	4
1	Renja/Disdik/01/2022	Dinas Pendidikan Aceh	
2	Renja/Dinkes/02/2022	Dinas Kesehatan Aceh	
3	Renja/RSUZA/03/2022	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin	
4	Renja/RSJ/04/2022	BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh	
5	Renja/RSIA/05/2022	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	
6	Renja/PUPR/06/2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
7	Renja/Pengairan/07/2022	Dinas Pengairan Aceh	
8	Renja/Perkim/08/2022	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
9	Renja/Satpol.PP.WH/09/2022	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
10	Renja/BPBA/10/2022	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
11	Renja/Dinsos/11/2022	Dinas Sosial Aceh	
12	Renja/Naker/12/2022	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
13	Renja/DP3A/13/2022	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
14	Renja/Pangan/14/2022	Dinas Pangan Aceh	
15	Renja/Tanah/15/2022	Dinas Pertanahan Aceh	
16	Renja/DRKA/16/2022	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
17	Renja/DPMGA/17/2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
18	Renja/Dishub/18/2022	Dinas Perhubungan Aceh	
19	Renja/Kominsa/19/2022	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
20	Renja/Kop.UKM/20/2022	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
21	Renja/DPMP2TA/21/2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
22	Renja/Dispora/22/2022	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	
23	Renja/Disbudpar/23/2022	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
24	Renja/Arpus/24/2022	Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh	
25	Renja/DPDA/25/2022	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
26	Renja/MPA/26/2022	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
27	Renja/KKW/27/2022	Keurukon Katibul Wali Aceh	
28	Renja/MAA/28/2022	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
29	Renja/Dinsyar/29/2022	Dinas Syariat Islam Aceh	
30	Renja/MPU/30/2022	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	
31	Renja/BMA/31/2022	Sekretariat Baitul Mal Aceh	
32	Renja/BRA/32/2022	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
33	Renja/DKP/33/2022	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
34	Renja/Tanbun/34/2022	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
35	Renja/Disnak/35/2022	Dinas Peternakan Aceh	
36	Renja/DLHK/36/2022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
37	Renja/ESDM/37/2022	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	
38	Renja/Indag/38/2022	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
39	Renja/Inspektorat/39/2022	Inspektorat Aceh	
40	Renja/BAPPEDA/40/2022	Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh	
41	Renja/BPKA/41/2022	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
42	Renja/BKA/42/2022	Badan Kepegawaian Aceh	
43	Renja/BPSDM/43/2022	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	
44	Renja/BPPA/44/2022	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
45	Renja/Ro.Umum/45/2022	Biro Umum Setda Aceh	
46	Renja/Ro.Pemotda/46/2022	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh	
47	Renja/Romi/47/2022	Biro Perekonomian Setda Aceh	

28

No.	NOMOR RENJA SKPA	SKPA	Keterangan
48	Renja/Ro.isra/48/2022	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh	
49	Renja/Ro. Organ/49/2022	Biro Organisasi Setda Aceh	
50	Renja/Ro.Hukum/50/2022	Biro Hukum Setda Aceh	
51	Renja/Ro. Adpem/51/2022	Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh	
52	Renja/Ro. Adpim/52/2022	Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh	
53	Renja/Ro.PBJ/53/2022	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Aceh	
54	Renja/Sek.DPRA/54/2022	Sekretariat DPR Aceh	
55	Renja/Kesbangpol/55/2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	

Handwritten mark

Pj. GUBERNUR ACEH
Handwritten signature

ACHMAD MARZUKI